KEMENTERIAN AGAMA RI

KANTOR KABUPATEN MALUKU TENGAH

Jl. Imam Bonjol PO BOX 001 KP. 97511 Telp/Fax. 0914 22429

Website: Http://malteng.kemenag.go.id email: mapendamalteng@mail.com

MASOHI

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MALUKU TENGAH

NOMOR: Kd. 25.02/1/PP.00.1/117/2013

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA ASSALAM NEGERI WOLU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MALUKU TENGAH

MENIMBANG :

- a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan memberikan pelayanan Pendidikan yang maksimal kepada masyarakat, perlu diberikan Izin Operasional Pendirian Madrasah bagi Madrasah yang telah memenuhi syarat;
- b. bahwa berdasarkan hasil pengamatan kondisi Objektif terhadap Madrasah Ibtidaiyah Swasta Assalam Negeri Wolu, Kecamatan Telutih Kabupaten Maluku Tengah, maka dipandang perlu untuk menerbitkan Izin Operasional Pendirian Madrasah.
- c. bahwa berdasarkan bertimbangan huruf a dan b di atas, maka perlu di terbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Maluku Tengah Tentang Izin Operasinal Pendidirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta Assalam Negeri Wolu

MENGINGAT :

- Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tabmbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang-Uandang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
- Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
- Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan Penyelenggaran Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

- Keputusan Presiden Nomor 24 tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Esolon I Kementerian Negara;
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Guru;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;

MEMPERHATIKAN

Surat Permohonan Yayasan Pendidikan Assalam Negri Wlo Kecamatan Telutih Kabupaten Maluku Tengah Nomor: 01/Y.AS.WL/VIII/2013 tanggal 23 Juli 2013 Perihal Permohonan Izin Operasional Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta Assalam Negeri Wolu Kecamatan Telutih Kabupaten Maluku Tengah

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MALUKU TENGAH TENTANG IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA ASSALAM NEGERI WOLU KECAMATAN TELUTIH KABUPATEN MALUKU TENGAH

PERTAMA

Memberikan Izin Penyelenggarakan Pendidikan Jenis / jenjang Madrasah Ibtidaiyah, dengan status terdaftar;

KEDUA

Nomor Statistik Madrasah (NSM) dan Piagam Pendirian Madrasah akan di berikan dalam waktu yang tidak terlalu lama;

KETIGA

Izin Operasional tersebut mulai berlaku pada Tahun Pelajaran

2012/2013;

KEEMPAT

Dalam menyelenggaraan Pendidikan Penyelenggara harus berpedoman pada seluruh peraturan perundang-undangan tentang kependidikan;

KELIMA

Izin menyelenggaraan pendidikan ini akan dievaluasi / diakreditasi ulang setelah berlangsung selama 3 (tiga) tahun;

KEENAM

Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya, jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini;

KETUJUH

Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

> DITETAPKAN DI : M A S O H I PADA TANGGAL : 18 DESEMBER 2013 K E P A L A,

D6s. USMAN BAHTA NIP. 196211251994031003.9

Tembusan kepada Yth.

- Kementerian Agama RI, Jakarta;
- 2. Sekertaris Jenderal Kementerian Agama RI, Jakarta;
- Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Acama RT Jakarta:

